

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mengentaskan kemiskinan, negara Indonesia menempuh berbagai strategi, salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat dengan memaksimalkan masyarakat setempat. Salah satu upaya pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat di desa yaitu dengan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan adanya BUMDes diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa (PMD) dan Pendapatan Asli Desa (PAD) serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan ekonomi dan pembedaan pelayanan umum. (Ningrum, 2020). Maka dari itu pendirian BUMDes sangat bermanfaat bagi masyarakat desa.

Mengenai awal mula pendirian BUMDes yaitu, pada era reformasi 1999 diterbitkan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 Pasal 108 untuk mendorong berdirinya perusahaan atau lembaga yang akan membantu mengelola sumber daya secara efisien. Kemudian diperjelas dengan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 Pasal 78 Ayat 1, yang menyatakan bahwa “Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa”. Pembentukan BUMDes juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2021 tentang BUMDes.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2021, BUMDes sebagai badan hukum bisa langsung menjalankan usahanya. Berbeda dengan dulu, BUMDes kini sah menjalin kerja sama dengan badan hukum yang lain seperti CV dan

PT (suara.com, 2021). Selain itu, adanya badan hukum yang baru dapat membantu BUMDes untuk mencari modal dengan mengajukan pinjaman dalam ketentuan performansi dan kejelasan aset yang akan dijaminkan (suara.com, 2021). Sehingga, dengan adanya kebijakan baru mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau lembaga pengelola diharapkan dapat meningkatkan perekonomian, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat.

Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia meningkat pesat, dari 1.022 BUMDes pada tahun 2014 menjadi 50.199 BUMDes pada tahun 2019 (lokadata.id, 2020). Pada tahun 2021 jumlah BUMDes mencapai 57.273 unit, diantaranya 45.233 BUMDes aktif dan 2.040 BUMDes tidak aktif. Abdul Halim Iskandar Menteri Pembangunan dan Pemukiman Kembali Daerah Tertinggal (PDTT) pada tahun 2021 mengatakan 45.233 BUMDes masih aktif mempekerjakan 20.369.834 orang dengan omset Rp 4,6 triliun selama setahun terakhir, dari 15.768 BUMDes terdampak negatif dalam usahanya karena pandemi, sehingga merumahkan sekitar 123.176 pekerja. Selain PHK, selama pandemi pendapatan yang diterima BUMDes juga menurun (kontan.co.id, 2022).

Wakil Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih menyebutkan bahwa keberadaan BUMDes di Kabupaten Bantul belum sehat atau kurang menguntungkan. Menurut beliau, BUMDes sehat itu usahanya dapat menguntungkan atau bisa menyetorkan devidennya ke Pendapatan Asli Daerah (antaranews.com, 2020). Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa (DPPKBPMMD) Bantul Sri Nuryanti (2020), mengatakan, saat ini dari 38 desa yang memiliki BUMDes yang sudah maju dan mandiri baru tiga BUMDes, yaitu di Desa Pangunharjo Sewon, Desa Srimartani Piyungan dan Desa Srigading Sanden. Karena menurut datanya dari total 75 desa se-Bantul yang sudah membentuk baru 38 desa dan 18 desa di antaranya desa mandiri, kemudian sisanya desa maju, namun untuk desa tertinggal dan desa baru berkembang di kabupaten ini hingga akhir 2019 sudah tidak ada (antaranews.com, 2020).

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPKBPMMD) Bantul Sri Nuryanti (2020), menyebutkan bahwa penyebab BUMDes belum mandiri karena faktor ego sektoral, jadi ada perang sendiri di antara internal di lingkup desa. Sehingga perangkat desa harus memiliki komitmen besar, jika perangkat desa tidak memiliki komitmen maka perangkat desa tersebut akan sulit berkembang (antaranews.com, 2020). Sebetulnya peran BUMDes dalam membangun perekonomian desa sangat besar namun pengetahuan dan pelatihan tentang pengelolaan BUMDes masih minim (kontan.co.id, 2022). Beberapa studi menunjukkan bahwa BUMDes dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan di beberapa daerah, yang telah menunjukkan potensi pengembangan dan peran pemberdayaan masyarakat melalui implementasi beberapa unit usaha seperti perkreditan, pengelolaan sampah dan kehutanan desa (Darwita & Redana, 2018). Studi lain oleh Kinasih et al. (2020) menemukan bahwa BUMDes di Desa Morosari terbukti mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa. BUMDes di Desa Morosari

memperoleh bahan baku dari pertanian warga sekitar dan menjalankan usaha pengolahan keripik. Ia juga berhasil menciptakan lapangan kerja baru. Bagi pemerintah desa, keberadaan BUMDes juga merupakan sumber pendapatan asli desa, sehingga tidak terlalu mengandalkan ADD dan DD. Di sisi lain, menurut penelitian Prasetyo (2016), BUMDes di Desa Pejambon berperan dalam pembangunan desa melalui pembangunan infrastruktur. Dana hasil BUMDes akan digunakan oleh pemerintah desa untuk membangun fasilitas umum guna menunjang kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat desa.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa manfaat yang dapat diambil dari pendirian BUMDes sangat banyak. Selain itu, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah Al Maidah Ayat 2 yang berbunyi:

... و تعاونوا على البر والتقوى و ال تعاونوا على الإثم و العدوان...

Artinya:” ...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...”

Potongan ayat tersebut menjelaskan bahwa berdirinya BUMDes dapat membantu perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sehingga warga desa harus saling bekerjasama agar tujuan dari berdirinya BUMDes dapat terwujud. Maka dari itu, Penelitian tentang kinerja BUMDes sangat menarik untuk diteliti.

Kinerja adalah gambaran dari tingkat pencapaian dalam mewujudkan sasaran tujuan dan misi, impian dari sebuah organisasi. Kinerja BUMDes merupakan kunci

dalam membangun desa menjadi lebih baik (Stikubank et al., 2019). Berdirinya BUMDes diharapkan dapat meningkatkan pendapatan desa maka dari itu kinerja BUMDes yang baik sangat diperlukan. Soejono et al (2021) menunjukkan bahwa kinerja BUMDes sudah cukup baik melalui faktor pendorong seperti mengembangkan dan menciptakan inovasi, serta dukungan dari pemerintah berupa suntikan dana.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja BUMDes. Berdasarkan teori *Resource Based View* (RBV) Apabila BUMDes mengelola sumber daya yang dimiliki secara optimal maka dapat meningkatkan keunggulan bersaing (Basri et al., 2021). Unger et al. (2011) mendefinisikan modal manusia sebagai keterampilan dan pengetahuan individu yang diperoleh melalui investasi dalam pendidikan sekolah dan pengalaman hidup. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa modal manusia mempengaruhi kinerja organisasi, misalnya, studi oleh Gupta & Rahman (2021) pada perusahaan di India. Selain itu ada Selain itu ada penelitian dari Widodo (2011) yang menunjukkan bahwa modal manusia mempengaruhi kinerja organisasi. Penelitian oleh Nugraha et al., (2018) juga menunjukkan bahwa kapasitas individu dan motivasi individu berpengaruh terhadap kinerja non keuangan perusahaan. Tetapi, penelitian Oktaviany & Raharjo (2019) dan Basri et al., (2021) menunjukkan bahwa modal manusia tidak mempengaruhi kinerja organisasi.

Selain modal manusia terdapat modal sosial yang dapat mempengaruhi kinerja. Penelitian Gandhiadi & Kencana (2020) dan Kim & Aldrich (2005) menemukan bahwa

modal sosial merupakan salah satu faktor penyebab tinggi rendahnya kinerja bisnis. Kim & Aldrich (2005) menggambarkan modal sosial, secara luas sebagai sumber daya yang tersedia dari hubungan sosial. Modal sosial mempengaruhi kesuksesan sebuah organisasi yang diperoleh dari informasi sesama rekan. Pengaruh modal sosial terhadap BUMDes dapat mengubah hal-hal dalam hal tata kelola sebuah organisasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengembangkan organisasi yang mensejahterakan masyarakat (Kim & Aldrich, 2005). Penjelasan ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Walenta (2019) dan Yohanes et al. (2017) menunjukkan bahwa modal sosial mempengaruhi kinerja UMKM. Basri (2021) menemukan bahwa modal sosial dapat meningkatkan kinerja. Sedangkan, penelitian Akintimehin et al. (2019) dan Easmon et al., (2019) menemukan modal sosial tidak mempengaruhi kinerja organisasi.

Dari penjelasan di atas terdapat ketidak konsistenan hasil penelitian sebelumnya mengenai modal manusia dan modal sosial terhadap kinerja BUMDes. Hal ini dimungkinkan adanya variabel pemediasi. Salah satu variabel yang diduga memediasi adalah kemampuan inovasi. Inovasi diperlukan bagi organisasi untuk menghadapi berbagai perubahan dalam lingkungan yang dinamis (Basri et al., 2020). Varadarajan & Jayachandran (1999) menjelaskan bahwa kemampuan inovasi organisasi mengacu pada keyakinan atau cara kerja yang mempengaruhi pandangan organisasi tentang bagaimana kemampuan inovasi dan perubahan harus ditangan. Sedangkan kemampuan inovasi produk menurut Wonglimpiyarat (2010) adalah

kemampuan untuk membawa pengetahuan baru atau teknologi untuk mengembangkan produk baru.

Berdasarkan hasil riset pengaruh modal manusia, modal sosial terhadap kinerja, penelitian ini mereplikasi penelitian Basri et al. (2021) yang menggunakan modal manusia dan modal sosial sebagai variabel independen, serta kemampuan inovasi sebagai variabel mediasi. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sampel yang akan digunakan pada penelitian. Untuk sampel, peneliti melakukan penelitian pada BUMDes di Kabupaten Bantul.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh modal manusia dan modal sosial terhadap kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan kemampuan inovasi sebagai variabel mediasi. Kajian tentang modal manusia dan modal sosial sangat jarang dilakukan (Basri et al., 2021). Maka dari itu, peneliti tertarik melakukan penelitian ini yang berjudul “Pengaruh Modal Manusia dan Modal Sosial Terhadap Kinerja BUMDes dengan Kemampuan Inovasi Sebagai Variabel Pemediasi (Studi Kasus pada BUMDes di Kabupaten Bantul)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah modal manusia berpengaruh terhadap kinerja BUMDes di Kabupaten Bantul?
2. Apakah modal sosial berpengaruh terhadap kinerja BUMDes di Kabupaten

Bantul?

3. Apakah kemampuan inovasi berpengaruh terhadap kinerja BUMDes di Kabupaten Bantul?
4. Apakah modal manusia berpengaruh terhadap kemampuan inovasi?
5. Apakah modal sosial berpengaruh terhadap kemampuan inovasi?

6. Apakah kemampuan inovasi memediasi pengaruh modal manusia terhadap kinerja BUMDes di Kabupaten Bantul?
7. Apakah kemampuan inovasi memediasi pengaruh modal sosial terhadap kinerja BUMDes di Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini dengan melihat latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh modal manusia terhadap kinerja BUMDes di Kabupaten Bantul.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh modal sosial terhadap kinerja BUMDes di Kabupaten Bantul.
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kemampuan inovasi terhadap kinerja BUMDes di Kabupaten Bantul.

4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh modal manusia terhadap kemampuan inovasi.
5. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh modal sosial terhadap kemampuan inovasi.
6. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris kemampuan inovasi memediasi pengaruh modal manusia terhadap kinerja BUMDes di Kabupaten Bantul.
7. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris kemampuan inovasi memediasi pengaruh modal sosial terhadap kinerja BUMDes di Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah bukti empiris tentang kinerja BUMDes. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya, Selain itu penelitian ini diharapkan dapat mengkonfirmasi teori *Resource Based View* bahwa modal manusia, modal sosial, dan kemampuan inovasi dapat meningkatkan kinerja BUMDes.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan pertimbangan untuk perumusan kebijakan di pemerintah daerah, pengambilan keputusan, serta evaluasi perbaikan atau koreksi yang dapat meningkatkan kinerja BUMDes.

- b. Sebagai bahan pertimbangan perguruan tinggi dalam mengembangkan materi pengajaran terkait kinerja BUMDes, serta sebagai bahan pertimbangan perguruan tinggi untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan kegiatan seperti Kuliah Kerja Nyata.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi BUMDes untuk meningkatkan kinerjanya, khususnya terkait modal manusia, modal sosial, dan kemampuan inovasi.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat tentang kinerja BUMDes di sekitarnya.